

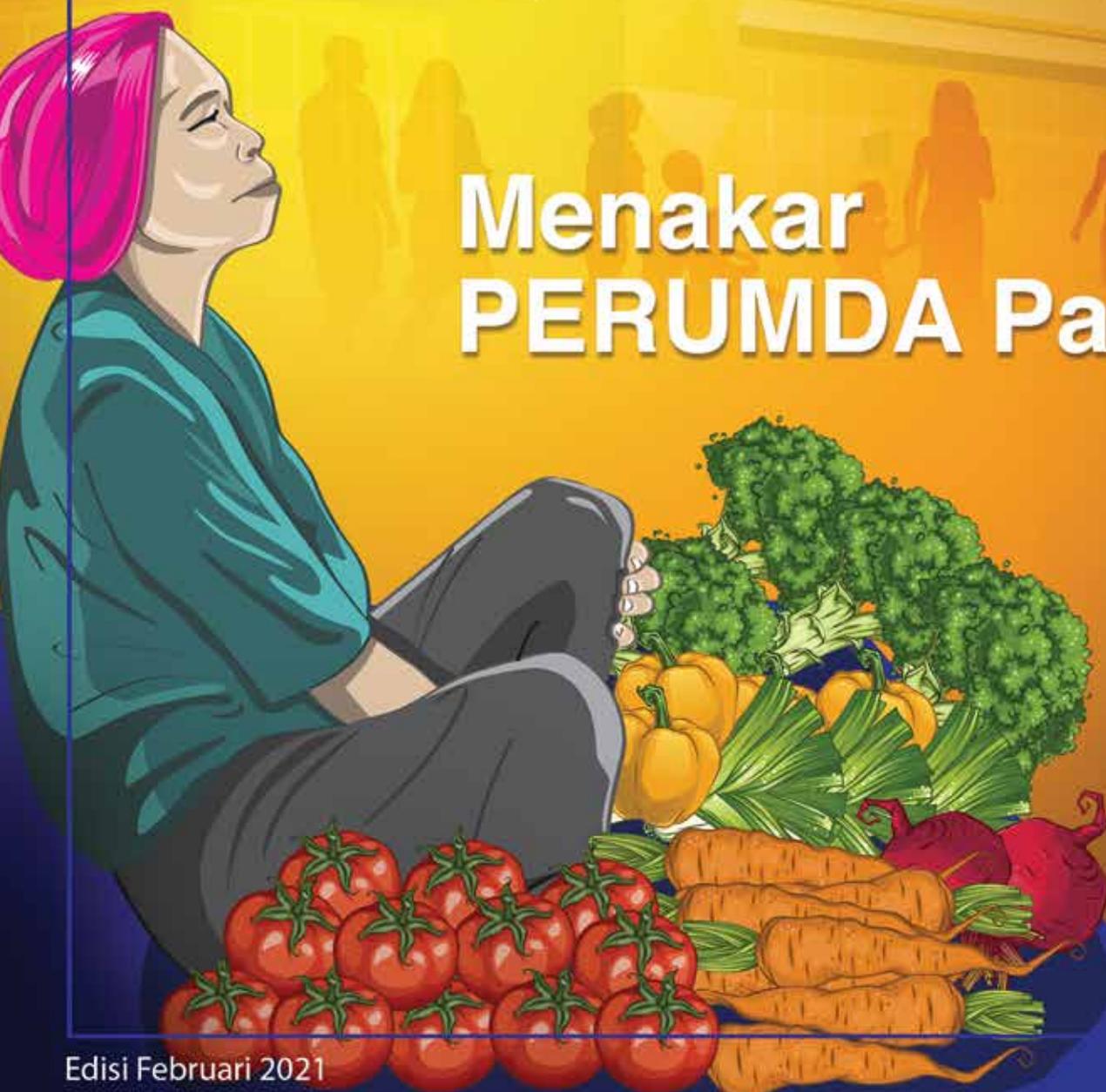


Cirebon Katon

Editor & Informasi Wakil Rakyat

PASAR MODERN

Menakar PERUMDA Pasar



Jangan Cepat Berpuas Diri



Apakah yang Anda rasakan saat berhasil menyelesaikan pekerjaan? atau ketika harapan Anda tercapai? Jawaban pertanyaan tersebut tentu beragam, namun umumnya kita merasa senang. Akan tetapi, kebahagiaan yang dirasakan jangan lekas membuat kita berpuas diri.

Cepat berpuas diri terhadap pencapaian bisa membuat kita terlenu. Pekerjaan atau harapan yang telah tercapai seakan menjadi akhir. Padahal, masih ada banyak pekerjaan dan harapan yang harus diwujudkan.

Selain terlenu kita menjadi enggan berinovasi dan berkreativitas. Sehingga tidak banyak terobosan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri dan pekerjaan. Jika hal tersebut terus

berlangsung, maka kerugianlah yang akhirnya didapat.

Prinsip tidak cepat berpuas diri sangat dipegang oleh Crew Majalah Cirebon Katon. Tiap edisi yang telah diselesaikan senantiasa dibarengi evaluasi. Inovasi dan kreativitas pun terus dilakukan, seperti memperbaharui cover yang lebih fresh, menambah rubrik potensi desa, dan rencana mendigitalisasi majalah.

Apresiasi dan pujian yang diterima tidak lantas menjadikan besar kepala. Saran dan kritik yang masuk pun tidak mengecilkan hati. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Sehingga fokus utama berada pada proses yang maksimal dengan tidak cepat berpuas diri terhadap hasil.

Salam Cirebon Katon!

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Siska Karina, MH
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag persidangan)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Mochammad Nurhiyana, S.STP., M.Si
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Wiwin Winarti, S.IP
(Kasubag Rapat dan Risalah)

Ardiles Afla Jatiwanto
(Kasubag Rumah Tangga)

Redaktur :

Yusuf

Reporter :

Maulana • Mu'izz • Hasan • Sarah

Fotografer :

Qushoy

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman

Distribusi :

Firman • Misbah

Korespondensi:

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon

• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Sederet Masalah Pasar Daerah
Semrawut hingga *Overload*



14 | KILAS

Rapat Koordinasi Penerimaan Vaksin



18 | PUBLIKA

Selokan Tertutup Bangunan



20 | LENSA

Semangat Merekah Pengrajin Bata Merah



22 | DINAMIKA KOMISI

Komisi I Evaluasi Tata Kelola Aset Desa

24 | Komisi II Gali Pengelolaan Mall Pelayanan Publik

26 | Komisi III Dorong PUPR Normalisasi Sungai

28 | Komisi IV Dukung RSUD Waled Jadi Rujukan Vaksinasi



30 | PROFIL

Junaedi :
Tekad Keras Berbuah Manis



34 | INSPIRASI

Kreasi Aluminium Bekas Jadi Lukisan 3 Dimensi

36 | POTENSI

Bukit Bambu
Suguhan Ketenangan Hingga Belajar Berkebun

Sederet Masalah Pasar Daerah Semrawut hingga *Overload*

Pasar daerah di Kabupaten Cirebon terlihat semrawut. Para pedagang yang lebih banyak berjualan di luar area kios, hingga penyelewengan retribusi. Bagaimana solusinya?



foto: foto: Quasy/dk

Ati, tak kuasa menahan kesal. Raut wajahnya pun tampak meredut. Seorang pedagang sembako di Pasar Sumber ini menggerutu lantaran omzet penjualannya selama di kios berkurang karena sepi pembeli. Ati pun hanya bertahan sekira 6 bulan sebelum pindah berjualan di luar kios.

“Selama enam bulan ibu pernah nungguin kios Pasar Sumber. Ibu berjualan sembako. Namun, penghasilan ibu paling besar Rp 60 ribu dalam sehari,”

ungkapnya.

Ati menilai, sepi pembeli dikarenakan keadaan pasar sumber yang semrawut. Para pembeli relatif tak dapat menjangkau kios miliknya, lantaran akses menuju lapak sangat sempit. Belum lagi kios miliknya terletak di bagian tengah, tertutupi barang jualan milik pedagang lain.

Mirisnya, kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya pedagang pasar yang berjualan di luar area kios bahkan hingga jalanan. Sehingga masyarakat

lebih memilih membeli kebutuhan pokoknya pun di sana. Ati menyebutkan, ada sekitar 76 pedagang yang berjualan di dalam kios. Sedangkan yang berjualan di luar, mencapai ratusan. Mereka mendirikan lapak semi permanen.

Ati pun menyayangkan, peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) yang dinilai belum tegas. “Berarti ini penataannya tidak benar. Disperdaginnya tidak berani mengatur dengan tegas,” ungkap Ati kesal.

Ati berharap Pemerintah Daerah (Pemda) bisa lebih serius dalam memperhatikan kondisi pasar. Ia meminta agar pasar sumber bisa tertata dengan baik. Misalnya, posisi kios di depan, sedangkan pedagang *lemprakan* berada di bagian belakang. Bahkan, kalau bisa tempat parkir berada di luar pagar.

“Tapi yang terpenting pasar ini harus punya muka. Rumah saja ada mukanya masa pasar tidak ada. Semua pasar, posisi kios berada di depan. Masa ini di belakang,” keluhnya lagi.

Perasaan yang sama diutarakan Alfi Baihaqi, seorang pedagang di Pasar Jamblang. Alfi mengeluhkan banyak pedagang yang tak memiliki lapak resmi memaksa berjualan di luar. Akhirnya berdampak pada pedagang kios yang mengikuti berjualan di luar, karena takut jualan mereka sepi.

Tentu, kondisi tersebut membuat omzet pendapatan Alfi menurun. Padahal, pedagang daging kambing ini mengaku telah menyewa lapak kios seharga Rp 20 juta. Pemuda yang sudah setahun setengah berjualan ini, juga tak pernah absen membayar retribusi.

Senada dengan Ati, Alfi juga meminta kepada Pemda agar segera melakukan penataan pedagang. “Saya ingin pasar berjalan sesuai fungsinya. Jalan digunakan sesuai fungsinya. Saya berharap para pedagang yang di luar pada masuk semua,” harapnya.

Berbeda dengan Ulu Saputra, seorang pedagang di Pasar Lemahabang. Ia tidak mengeluhkan kondisi Pasar Lemahabang lantaran penataannya terbilang rapi.

Selain itu, mengenai pembayaran retribusi, Ulu juga tidak mempermasalahkan nominalnya. Setiap hari, Ulu membayar



sebesar Rp 2.900 untuk retribusi lapak. Rinciannya untuk kebutuhan listrik, keamanan hingga kebersihan. Sedangkan setiap tahunnya, Ulu membayar iuran sebesar Rp 250 ribu.

“Itu masih ringan. Kalau beli kios sendiri kan bisa sampai puluhan juta,” kata warga Desa Cipeujeuh Wetan ini.

Ulu hanya mengeluhkan pandemi Covid-19 yang sampai sekarang tak kunjung reda, akibatnya pemasarannya mengalami resesi. Ulu mengaku, sejak wabah Covid-19 masuk ke Indonesia pendapatannya selalu menurun.

Apalagi ketika kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan, omzet yang

didapat menurun hingga 50 %.

Peraturan PSBB atau Peraturan Pembatasan Kerumunan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan Pemda, mengharuskan para pedagang pasar membatasi jam berjualan hanya sampai pukul 12 siang. Padahal kata Ulu, biasanya ia maupun pedagang lainnya berjualan sampai jam 4 sore.

“Kalau sebelum pandemi covid-19, saya mendapat omzet Rp 2 juta sampai 4 juta. Namun sekarang setengahnya saja tidak,” kata Ulu.

Sementara itu Lina, pedagang luar Pasar Jamblang, menanggapi alasan mengapa berjualan dipasar. Ia merasa berat dengan



biaya sewa lapak yang sangat mahal, namun tidak sebanding dengan kualitasnya.

“Tidak mau di dalam, tempatnya kecil. Bingung mau letakin barangnya. Kalau di luar kan hanya bayar karcis aja Rp 5 ribu,” ungkapnya.

Pedagang Pasar Susah Diatur

Kondisi semrawutnya pasar daerah sebenarnya telah lama disadari Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperdagin Anthony mengatakan, kondisi semrawut pasar ini, berawal dari musibah kebakaran yang terjadi di pasar darurat. Sehingga para pedagang tersebut berpindah berjualan di Pasar Sumber.

Anthony menyebutkan, para pedagang yang awalnya berjumlah 700 pun kini bertambah menjadi seribu lebih. Hal itu membuat kondisi pasar tampak padat, bahkan tidak bisa lagi menampung pedagang. Sehingga mau tidak mau, pedagang pasar berjualan di luar. Bahkan

mereka sampai berjualan di kawasan tempat parkir.

Kondisi tersebut, sebenarnya juga diperparah pasca revitalisasi pasar sumber pada Februari 2019 lalu. Lapak baru yang tersedia hanya mampu digunakan untuk 549 pedagang. Sedangkan pendaftar yang ingin menempati lapak berjumlah 1.309 pedagang. Sehingga ada kebijakan pedagang boleh membuka lapak dagangannya di sepanjang jalanan sekitar pasar sumber.

“Kalo dipindahkan ya risikonya seperti itu. Para pedagang di kawasan parkir itu banyak yang tidak memiliki izin,” katanya.

Sebagai solusi, Disperdagin harus melakukan penataan pedagang. Anthony mengaku, setidaknya Disperdagin pernah melakukan penertiban para pedagang di luar agar pindah berjualan di dalam kios.

Namun sangat disayangkan, kata Anthony, banyak dari para pedagang tersebut yang menolaknya. Padahal lanjut Anthony,

kalau pedagang yang di luar berjualan di dalam semua, secara otomatis para pengunjung juga akan masuk dan membelinya.

Ia bilang, Disperdagin tidak bisa melakukan pemberian sanksi maupun konsekuensi lainnya. Sebab, belum ada payung hukum maupun Peraturan Daerah (Perda). Apalagi menurutnya, hal itu terbentur dengan kondisi mereka secara manusiawi, yang sedang berjuang untuk menafkahi keluarganya.

Pasar Overload

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Mad Saleh, merasa geram melihat kondisi para pedagang pasar yang mengalami *overload*. Ia pun mengaku sering berdiskusi dengan dinas perihal permasalahan tersebut.

“Saya sering evaluasi dengan Disperdagin, kenapa kapasitas pedagang secara kapasitas *overload*? Kan seharusnya ada klaster,” ujarnya.

Mad Saleh menjelaskan,



klasterisasi mengatur jumlah pedagang sesuai kondisi pasar, bukan untuk menghilangkan hak rakyat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Ia pun menerangkan alasan para pedagang pasar banyak yang berjualan di luar area, hal itu dikarenakan mereka tidak mampu membayar biaya sewa lapak. Selain itu, alasan lainnya, karena kapasitas pasar yang tidak memadai.

“Saya belajar dari Pasar Ciledug yang jumlah kuotanya 400. Namun karena banyak warga yang ingin mencari nafkah, pedagang yang mendaftarkan melapak jumlahnya mencapai sekitar 700,” terangnya.

Untuk itu, Mad Saleh pun meminta harus ada sikap dari Disperdagin sebagai solusi agar kepentingan masyarakat maupun Pemda tetap bisa tercapai. Ia pun menyarankan, langkah atau pun opsi yang perlu dilakukan dinas untuk mengatasi *overload*-nya para pedagang pasar.

Pertama, para pedagang luar yang tidak memiliki lapak resmi, harus dipindahkan terlebih dahulu ke bagian belakang pasar. Hal tersebut guna menghormati para pedagang pasar yang telah membayar biaya sewa lapak. Langkah kedua, kata Mad Saleh, jumlah nominal biaya sewa lapak agar tidak memberatkan pedagang kecil.

“Saya sering menerima keluhan dari pedagang kecil yang berjualan lebih lama. Karena tidak mampu membayar jumlah biaya retribusi, mereka tereliminasi oleh pedagang baru yang mampu membayarnya,” ungkapnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Moh Ridwan menambahkan, ada tiga langkah yang perlu dilakukan agar kondisi pasar lebih layak dan tertib. Pertama, ada aturan secara tertulis tentang pembatasan jam berjualan bagi pedagang di luar.

“Jadi jangan sama dengan

pedagang yang di dalam. Karena itu kurang sehat, tidak kompetitif,” jelasnya.

Kedua, kata Ridwan, Disperdagin perlu mengevaluasi kapasitas infrastruktur pembangunan pasar. Seperti menambah jumlah lapak untuk pedagang, memperbaiki akses jalan hingga parkir.

Terakhir, yaitu soal keamanan pasar. Ridwan mengungkapkan, ada beberapa pasar tradisional Kabupaten Cirebon yang pernah mengalami kebakaran seperti Pasar Sumber dan Pasalaran. Untuk itu, Dinas harus melakukan upaya preventif penanganan pasar. Caranya melakukan kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran.

“Disperdagin harus bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk mengadakan pelatihan simulasi. Sebab, seringkali kalau sudah merasa aman dan nyaman, mereka tidak bisa menerangkan penyebab kebakaran pasar terjadi. Padahal kebakaran itu kapan saja bisa terjadi,” ungkapnya.

Selain itu, Mad Saleh juga menyoroti retribusi pasar yang hingga sekarang belum ada transparansi. Pasalnya, ia melihat masih ada oknum yang memanfaatkan iuran retribusi dan berdampak pada pendapatan pasar.

Kondisi ini dipahami betul DPRD Kabupaten Cirebon. Sebagai solusi, DPRD Kabupaten Cirebon tengah menggodok payung hukum berupa Perda Inisiatif Bupati. Raperda yang disiapkan adalah soal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) pasar. selain sebagai payung hukum, Perda Perumda memberikan panduan strategis pengembangan pasar dengan kondisi faktual. Namun rencana ini masih menuai polemik. •Muiz/Suf

Rencana Pendirian Perumda Pasar

Pemkab Cirebon berencana mendirikan Perumda Pasar. Kebijakan ini diinisiasi oleh Bupati Cirebon Imron Rosyadi. Namun hingga sekarang masih dipertimbangkan.



Kondisi pasar daerah Kabupaten Cirebon saat ini cukup memprihatinkan. Dari 9 pasar daerah yang berada di bawah naungan dinas, hampir semuanya memiliki masalah yang sama. Di antaranya: lahan parkir, fasilitas, hingga para pedagang yang lebih memilih berjualan di luar kios.

Padahal, pasar merupakan salah satu penyumbang PAD yang cukup signifikan. Pada 2020 misalnya, sekalipun sebagian pasar mengalami pembatasan jam operasional akibat pandemi Covid 19, namun masih bisa menyumbangkan retribusi hingga Rp 1,9 miliar.

Kondisi demikianlah yang membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, berencana membenahi pasar daerah melalui inisiatif Perda Perumda Pasar. Saat ini, tahapannya masih pada kajian akademis di lapangan dan pembahasan.

"Perumda pasar merupakan inisiatif dari Bupati Cirebon Imron Rosyadi. Kita masih menunggu hasil kajian lapangan. Kita akan tindaklanjuti kalau su-

dah tahu hasilnya," kata Anthony, Kabid Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Mad Saleh, mengatakan sangat mendukung rencana pendirian Perumda yang diusulkan bupati ini. Namun ia berharap, rencana pendirian Perumda ini agar dibahas secara serius dan intens terlebih dahulu. Hal itu menurutnya agar terhindar dari berbagai kesalahpahaman maupun penyelewengan. Misalnya penyelewengan pada retribusi yang berdampak pada pendapatan.

"Saat ini retribusi masih melalui rekening dinas. Jadi masih ada oknum yang menyelewengkan akhirnya berdampak pada pendapatan retribusi. Kalau nanti akan jadi Perumda, saya harap sistem retribusi tidak lagi melalui rekening ke dinas. Tapi langsung sistem elektronik, jadi langsung masuk ke kas daerah," ujarnya.

Ia menilai, ketika retribusi langsung masuk KAS



daerah. Maka akan lebih mudah dalam mengauditnya, apalagi, lanjut Mad Saleh, tahun ini akan fokus pada pembenahan PAD.

Selain itu, ia juga berharap rencana Perumda ini harus lebih memperhatikan kondisi pedagang, fasilitas hingga penertibannya yang lebih tegas. Ia menilai keberadaan pasar daerah hampir memiliki masalah yang sama.

"Problemnya sama, perlu perluasan lahan parkir maupun fasilitas pedagang yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, kalau ada pedagang yang lagi hamil, menyusui dan lain sebagainya. Itu kan perlu ruangan maupun fasilitas yang khusus," tandasnya.

Namun, untuk menjadi Perumda Pasar, kata Anthony, harus ada beberapa syarat sebelum diketokpalukan. Pertama, perlu persetujuan Kementerian dalam negeri (Kemendagri) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017.

"Untuk memenuhi ketentuan tersebut, perlu kelengkapan kajian. Jika hasil kajian itu sudah selesai, maka akan diserahkan

ke kementerian untuk dievaluasi bersama. Kalau memang sudah matang, maka bisa segera ditindaklanjuti," jelasnya.

Sejauh ini pun, Disperdagin telah menggelar rapat bersama Bapemperda dalam rencana pembentukan perda.

"Kemarin kita rapat dengan Bapemperda membahas hasil kajian dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon. Saat ini kita belum menerima laporannya seperti apa. Kalau memang nantinya sudah layak, akan ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui," jelasnya.

Ia meyakini, rencana pendirian Perumda Pasar melalui inisiatif bupati ini akan mampu menjawab persoalan pasar yang saat ini masih membelenggu, terutama dalam penyediaan barang dan jasa. Selain itu, dengan adanya Perda, setidaknya akan lebih leluasa dalam mengembangkan usaha. Dan hal ini akan berdampak pada peningkatan PAD.

"Nantinya mampu menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang lebih bermu-

tu. Bagaimana permodalannya? Kalau untuk potretnya sudah ada," terangnya.

Anthony juga berharap, pasar yang ada di Kabupaten Cirebon nantinya akan bisa lebih maju. Karena pasar merupakan jasa publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Baik pengunjung maupun pedagang kita berharap bisa profesional," ujarnya.

Selain itu, Anthony juga berpendapat manfaat yang diperoleh ketika menjadi Perumda, di antaranya pasar tidak bergantung pada anggaran Pemda.

"Kalau jadi Perumda, kan bisa kerjasama dengan perbankan, maupun swasta. Sekaligus mampu menggali potensi PAD, jadi gak ngandelin anggaran Pemda," jelasnya.

Kemudian manfaat lainnya, kata Anton, akan ada aturan dan sanksi pada pengelolaan retribusi harian, tahunan, parkir, kebersihan hingga promosi yang nantinya diatur sedemikian rupa.

"Kalau sekarang kan mau ngatur dan sanksi juga tidak bisa. Kecuali kalau sudah diperumdarkan," katanya.

Sementara itu, Mad Saleh berpendapat Perumda harus melakukan pelayanan yang harus bisa menjadi contoh bagi perusahaan swasta, begitupun dengan proses pengawasannya.

"Kalau jadi Perumda harus lebih intens pengawasannya. Sistemnya harus berbasis teknologi, semacam *tapping box*. Pelayanan juga harus lebih baik lah dari swasta," tandasnya.

Namun, sampai saat ini, Perda Perumda Pasar masih direken. Sebagian pihak merasa gamang yang membuatnya tarik ulur. Akibatnya DPRD pun belum bisa menggodoknya. •Suf/Muiz

Belajar Dari PD Pasar Jaya Tiap Tahun Setoran PAD Naik Signifikan

PD Pasar Jaya memiliki modal dasar Rp 5 triliun sejak menjadi Perumda. Kini, PD Pasar Jaya pun mampu menyetorkan PAD yang selalu naik secara signifikan pada tiap tahunnya. Bagaimana caranya?



foto: fessid - dok. pasar jaya

Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar memang belum masuk propemperda. Namun kini Bapemperda

masih mengkaji secara akademis. Tentu saja payung hukum ini dalam rangka menjawab persoalan pasar daerah di Kabupaten Cirebon.

Ide pendirian Perumda Pasar merupakan inisiatif dari Bupati Cirebon. Berangkat dari keprihatinannya pada kondisi pasar mulai dari penataan, kebersihan

an, keamanan hingga ketertiban agar bisa lebih baik. Selain itu, pasar merupakan salah satu penyumbang PAD cukup besar bagi daerah melalui retribusi.

“Kita ingin pasar itu lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik pengunjung, pedagang, agar bisa profesional. Sehingga kita perlu perumda. Bagaimana penertiban hingga manajemennya,” kata Anthony, Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Mad Saleh, juga sangat mendukung rencana pendirian Perumda yang diusulkan bupati ini. Namun ia berharap, rencana pendirian Perumda ini agar dibahas secara serius dan intens terlebih dahulu. Hal itu menurutnya, untuk menghindari penyelewengan dalam retribusi. Ia berpendapat, pengelolaan retribusi pedagang agar langsung melalui rekening kas daerah.

“Saya harap sistem retribusi bukan melalui rekening ke dinas. Tapi langsung sistem elektronik. Jadi langsung masuk ke kas daerah. Kita kan mengauditnya lebih enak dan mudah. Apalagi sekarang kita kan fokus pada pembenahan PAD,” jelas Mad Saleh.

Selain itu, ia juga berharap rencana Perumda ini akan lebih memperhatikan kondisi pedagang, fasilitas hingga penertibannya yang lebih tegas.

“Perlu perluasan fasilitas parkir, fasilitas pedagang agar lebih diperhatikan. Sejauh ini kan keberadaannya masih terlihat berserakan. Ada pedagang yang lagi hamil, menyusui dan lain sebagainya. Itu perlu ruangan maupun fasilitas yang khusus,” tandasnya.



foto dok. okezone.com

Belajar dari Pasar Jaya

Pada 1967, Gubernur DKI Jakarta mengesahkan pendirian Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya, hal itu tertuang dalam surat pengesahan Menteri Dalam Negeri lewat Keputusan No. Ekbang 8/8/13-305. Keputusan Gubernur tersebut, selanjutnya ditingkatkan dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 1982. Perda tersebut disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri pada 1983.

Dalam upaya peningkatan peranan, PD Pasar Jaya yang merupakan perusahaan daerah profesional mengantisipasi tuntutan perkembangan bisnis perpasaran yang makin kompetitif. Pada 30 Desember 1999, PD Pasar Jaya ditetapkan kembali melalui Perda DKI Jakarta No. 12 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta, yang tertuang dalam Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 35.

Seiring bergulirnya waktu, PD Pasar Jaya terus berkembang menjadi entitas bisnis yang leng-

kap dan kompleks. Kenyamanan dan kepuasan pelanggan (*consumer satisfaction*) menjadi tujuan utama. Hingga sekarang Pasar Jaya telah mengelola 153 pasar yang tersebar di seluruh provinsi Jakarta.

PD Pasar Jaya, merupakan pasar tradisional dan modern dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang lengkap segar, murah dan bersaing. PD Pasar Jaya pun mengalami peningkatan pendapatan sejak beberapa tahun terakhir, yaitu mulai dari Rp500 miliar pada 2016, Rp700 miliar pada 2017, dan Rp 960 miliar pada 2018 dari target Rp940 miliar.

Selanjutnya tahun 2019, Pasar Jaya pun mendapuk kenaikan realisasi pendapatan yang menargetkan hingga mencapai Rp 1,1 triliun. Hal itu beriringan dengan semakin berkembangnya bisnis perusahaan, khususnya dalam distribusi pangan.

Bukan itu saja, porsi sumber pendapatan perusahaan juga ikut berubah. Jika sebelumnya pendapatan didapat dari bisnis sewa-menyewa kios atau toko di



153 pasar. Kini perusahaan yang baru 3 tahun berganti status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) pada 2018 tersebut justru mendapat perkembangan di sektor distribusi pangan.

Pendapatan dari distribusi pangan melesat setelah Pasar Jaya meresmikan gerai Jak Grosir pertama di Pasar Induk Kramat Jati. Setelah itu, barulah pengembangan sayap ke toko ritel, yaitu Jak Mart dan Mini Jak Mart. Saat ini, total gerai ritel yang dimiliki Pasar Jaya tersebar di 58 lokasi.

Sedangkan komposisi pendapatan yang diperoleh PD Pasar Jaya, 35% merupakan hasil dari distribusi pangan, 35% sewa-menyewa toko, dan sisanya parkir.

Selain itu, PD Pasar Jaya pun telah menyelesaikan pembangunan Jak Grosir pertama di

Kepulauan Seribu. Alasan Pemprov DKI membangun Jak Grosir agar dapat menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok di pasar. Para pedagang atau warga yang memiliki toko di Kepulauan Seribu tidak perlu jauh-jauh membeli kebutuhan pokok di daratan Jakarta.

Selanjutnya, PD Pasar Jaya juga mulai merambah bisnis properti sejak 2018, yakni lewat pembangunan rumah susun (rusun) terpadu pasar. Selain itu, PD Pasar Jaya telah dimanfaatkan menjadi *mixed building*.

Perda Disahkan

PD Pasar Jaya Resmi menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) setelah Perda tentang pengelolaan dan pengembangan usaha tersebut disahkan DPRD pada 2018 silam. Sehingga, peru-

sahaan plat merah yang bergerak di bidang pangan dan perpasaran itu kini dapat mengembangkan usahanya lebih leluasa.

Dewan telah menyetujui pengelolaan dan pengembangan usaha Pasar Jaya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Perda yang terdiri dari sembilan bab dan dua puluh empat pasal itu, mengatur soal penyusunan rencana pengembangan bisnis PD Pasar Jaya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.

Hal itu pun, telah membuka kesempatan PD Pasar Jaya dalam pengembangan bisnis yang berkaitan dengan pangan. Salah satunya, memastikan kecukupan stok bahan pangan agar dapat mengendalikan harga jual di pasar.

PD Pasar Jaya dalam salah satu tujuan pendiriannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan modal dasar sebesar Rp 5 triliun.

Dengan adanya beleid melalui Perda Perumda, setidaknya telah memudahkan PD Pasar Jaya dalam berekspansi mengembangkan pasar modern di Jakarta. Tugas Pokok PD Pasar Jaya adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa.

Alhasil tahun 2019, Pasar Jaya mampu menyetorkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 39 miliar. Itu didapat dari pendapatan keseluruhan pada tahun 2018 sebesar Rp 960 miliar. Sumber lain perusahaan didapat dari reklame, penyewaan kios, hingga usaha jakmart dan jakgrosir. Sementara dalam pengelolaan parkir, PD Pasar Jaya juga telah meraup pendapatan sebesar Rp 10,7 miliar. •Suf

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Rapat Koordinasi Penerimaan Vaksin

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon bersama Forkopimda menggelar rapat koordinasi penerimaan vaksin Covid 19 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon di Polresta Cirebon.



foto-foto : Quasy/ik

Forkopimda Hingga Nakes Divaksinasi

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon bersama tenaga kesehatan hingga *influencer* lokal, menerima vaksinasi Covid 19, setelah dinyatakan lolos uji tahap persyaratan. Penyuntikan dilakukan dengan didampingi Bupati Cirebon dan Kepala Dinas Kesehatan Cirebon.



foto-foto : Quasy/ik

Monitoring Pembangunan RS Waled

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi RS Waled untuk meninjau pembangunan gedung pelayanan kelas 3, pemagaran area lahan baru serta gedung olahraga (*sport centre*).



Rencana Pengembangan Potensi Wisata

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudarpora) serta Dinas Perhutani, mengenai pengembangan potensi wisata yang ada di Kabupaten Cirebon.



foto-foto : Quosy/k

Selokan Tertutup Bangunan

Salam hormat, saya sampaikan kepada Bapak/Ibu dewan. Saya ingin memberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Cirebon agar bisa memperhatikan bangunan masyarakat yang menutupi saluran air di samping jalan/selokan. Jika curah hujan sedang tinggi, ini sangat berpotensi menyebabkan banjir dan genangan air. Tidak sedikit warga yang mengecor bangunan pinggir jalan secara permanen. Padahal persis di sampingnya terdapat selokan. Hal ini menyebabkan saluran air tidak berfungsi. Saya harap aturan dalam mendirikan bangunan harus dipertegas. Selain itu saya juga berharap, pemerintah bisa mengarahkan dinas terkait agar menertibkan persoalan seperti ini demi meminimalisir terjadinya banjir. Terimakasih kepada Cirebon Katon yang berkenan menerbitkan.

Salam
(Sujaya(37)/Susukan/Buruh)



Keluhkan Jalan Berlubang

Assalamu'alaikum wr.wb. Yang terhormat Bapak/Ibu DPRD.

Saya Adde Nursyafi'i, warga Desa Ciledug. Saya ingin melaporkan bahwa akses jalan penghubung antara dua kecamatan rusak parah, tepatnya di Pasar Sayur Pabuaran. Ini sudah kesekian kalinya jalan mengalami rusak parah. Para warga sekitar sudah berusaha menambalnya secara swadaya, tapi tidak sampai sebulan sudah rusak kembali. Ini diakibatkan kendaraan besar juga melintas. Bis antar kota, truck maupun angkutan umum.

Selain itu, terdapat lubang-lubang membuat berbahaya bagi pengendara. Terlebih ketika hujan lebat, lubang-lubang itu tertutup genangan air. Saya sangat berharap tahun ini bisa diperbaiki secepatnya. Mohon kiranya Bapak/Ibu DPRD bisa menindaklanjuti permasalahan di daerah kami. Terimakasih.

Adde/Pedagang/Ciledug



Perlu Perhatian Potensi Wisata

Assalamu'alaikum Bapak/Ibu dewan, saya Abdurahman, warga Kecamatan Talun. Saya ingin memperkenalkan bahwa di Kabupaten Cirebon terdapat wisata arung jeram dan tubing. Wisata ini dikelola oleh karang taruna yang memberdaya-

kan Sungai Cipager Desa Kubang Kecamatan Talun. Sebetulnya sudah ada sejak awal 2020 lalu, namun saat ini ditutup sementara karena debit airnya sedang naik mengingat tingginya curah hujan.

Kepada Bapak/Ibu dewan mohon

bisa mendorong mempromosikan sekaligus memberi dukungan agar kedepannya objek wisata ini bisa berkembang. Terima kasih.

Abdurahman(24) / Mahasiswa / Talun

Evaluasi Bantuan UMKM



Assalamu'alaikum wr.wb. Bapak/Ibu DPRD yang saya hormati. Saya Ida, warga desa Pabuaran Lor. Program bantuan UMKM di desa kami hingga kini masih mengalami persoalan. Berawal sejak November 2020 lalu, proses pengajuan yang dikolektifkan oleh oknum perangkat desa dalam pencairannya belum tepat sasaran. Selain itu, ada juga indikasi pengurangan bantuan sebesar 20 persen oleh oknum. Bahkan, jika ada warga yang tidak mau memberikan potongan tersebut, maka proses pengajuan bansos selanjutnya tidak akan diurus lagi. Mohon kiranya bapak/ibu DPRD bisa menindaklanjuti permasalahan di desa kami. Terimakasih.

Semangat Merekah Pengrajin Bata Merah

Sudah lebih dari 45 tahun Jumena meneruskan usaha keluarganya. Semenjak umur 10 tahun, ia mengikuti orang tuanya bekerja memproduksi bata merah di Desa Pekantingan, Kecamatan Klangeran.

Dalam sehari, Jumena mampu memproduksi 300 hingga 800 bata.

"Produksinya tergantung cuaca, kalo cuacanya begini (siang panas, sore hujan), kadang untuk bikin 20 ribu bata bisa sampai dua bulan," ungkapnya.

Dengan proses yang begitu panjang, para pengrajin bata hanya mendapat 40 persen dari hasil produksi bata merah.

"Untuk 1 bata merah dihargai seribu rupiah, saya hanya dapat Rp 400 rupiah saja," jelas Jumena.

Namun, Jumena patut berbangga diri. Sekalipun hanya menjadi pengrajin bata merah.

Ia telah berhasil menghantarkan anak sulungnya dari 3 bersaudara menjadi seorang TNI. •soy



Komisi I Evaluasi Tata Kelola Aset Desa

Pemerintah Desa Ambulu telah berhasil mengelola keuangan dan aset desa secara tertib. Seperti apa langkahnya?



foto: foto . dok . setivan

Menindaklanjuti hasil rapat dengan Badan Muswarah (Banmus) untuk mengevaluasi keuangan dan aset desa. Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon pun mengunjungi Desa Ambulu, Kecamatan Losari.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Abdul Rohman, menyampaikan beberapa pokok permasalahan yang masih sering terjadi di sejumlah desa. Salah satunya, mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dinilai

belum tertib.

“Selama ini beberapa desa yang sudah kami kunjungi mengenai APBDes, seringkali belum tertib dalam pengelolaannya. Baik itu secara akuntabel, transparansi maupun partisipatif,” paparnya.

Selain itu, kerap kali dalam proses penyusunan APBDes, terdapat kekeliruan dalam memahaminya. Padahal, kata Rohman, keuangan desa dan penyusunan APBDes harus menyesuaikan dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Yakni, berdasarkan Musyawarah Dusun (Musdus),

Musyawarah Desa (Musdes) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Menanggapi itu, Kuwu Desa Ambulu Sunaji, mengatakan sistem pengelolaan keuangan desa di Ambulu sudah sesuai dengan arahan kecamatan. Menurutnya, penyusunan rancangan APBDes mengacu pada RPJMDes, dan selalu berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Penyusunan APBDes kita sudah melalui hasil Musdus dan Musdes yang melibatkan BPD,” tegasnya.



Sunaji juga menyampaikan, total APBDes Ambulu pada 2020 sebesar Rp 2,41 miliar atau Rp 2.410.794.906. Ia memaparkan besaran tersebut terdiri dari komposisi dan proporsi belanja dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan.

“Rinciannya, Rp 8 juta dari hasil bagi Bumdes, Rp 1,5 miliar dari anggaran dana desa. Kemudian, Rp 416 juta dari alokasi dana desa, Rp 130 juta dari bantuan keuangan provinsi, Rp 40 juta dari bantuan keuangan kabupaten, serta Rp 204 juta dari bagi hasil pajak,” ujarnya.

Sedangkan, APBDes tahun 2020 juga memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 150 juta. Ia melanjutkan, SILPA tersebut, bersumber dari kegiatan yang belum direalisasikan maupun dari beberapa efisiensi kegiatan.

Selain itu, Sunaji juga mengaku Desa Ambulu telah melakukan penyertaan modal dari APBDes untuk BUMDes pada 2019 dan 2020. Hal itu dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat pengembangan potensi desa, dengan tujuan agar PADes dapat meningkat.

“Pemberian modal Bumdes sebesar Rp 200 juta, untuk mengelola pariwisata mangrove. Mulanya hasil yang disumbangkan PAD sebesar Rp 12 juta. Namun karena pandemi, hasil pariwisata mangrove hanya bisa menyumbangkan PAD sebesar Rp 8 juta karena sepi pengunjung,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Rohman pun sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Desa (Pemdes) Ambulu atas pencapaian kinerja yang telah dilakukan. Ia menilai, pemberdayaan masyarakat Desa Ambulu telah terlihat dalam skala yang cukup besar dibandingkan desa lain. Menurutnya, hal itu harus bisa menjadi acuan penting, untuk bekerjasama melahirkan desa yang unggul dalam berbagai segi.

Ia pun membandingkan beberapa desa di Kabupaten Cirebon yang masih mengalami konflik bahkan secara internal. Untuk itu, ia berharap Pemdes Ambulu bisa memberikan contoh kepada desa-desa lain mengenai kerjasama dalam pengelolaan keuangan desa.

“Kerjasama dan keharmonisan antara Kuwu dan BPD Desa Ambulu patut dijadikan contoh sederhana bagi tumbuh kembangnya desa. Sebab, seringkali permasalahan dilatarbelakangi oleh ketidakharmonisan,” katanya.

Selain itu, Rahman juga meminta kepada Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Camat Losari yang hadir, agar terus melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap desa-desa di wilayahnya.

“Saya berharap, *stakholder* bisa ikut serta mengawal dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di tingkat desa,” pungkasnya. •Sar/Ian

Komisi II Gali Pengelolaan Mall Pelayanan Publik

Mall Pelayan Publik di Kabupaten Banyumas dinilai telah mampu memberikan pelayanan masyarakat yang mudah dan efisien. Bagaimana Kuncinya?



Foto: foto: dok. setiawan

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon berencana membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah masyarakat mendapat pelayanan. Rencana tersebut mendapat perhatian serius oleh Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon.

Perhatian itu ditandai dengan mengunjungi kantor DPRD Kabupaten Banyumas, guna menggali pengelolaan MPP. Kedatangannya, pun disambut baik DPRD Kabupaten Banyumas dan jajaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dr Budhi Setiawan mengatakan, Kabupaten Banyumas telah memiliki MPP yang dikelola Dinas PMPTSP. Mall tersebut berfungsi memberikan pelayanan publik yang mudah dan efisien.

"Mall tersebut melayani banyak jenis. Mulai dari pajak kendaraan bermotor, SIM Polri, hingga perizinan imigrasi yang berada dibawah naungan Kemendikbud," katanya.

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Banyumas Amrin Ma'ruf menyampaikan, dengan dikelolanya MPP oleh Dinas PMPTSP,

maka wewenang penandatanganan sudah di Dinas PMPTSP. Dengan begitu, pelayanan masyarakat terpusat di Dinas PMPTSP.

Misalnya, di daerah lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih membutuhkan rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum (PU). Tetapi di Kabupaten Banyumas pemohon tidak perlu datang langsung mendatangi Dinas PU. Pemohon cukup di rumah dengan mengunggah semua persyaratan.

"Nanti kami yang mengirimkannya ke PU. Kecuali jika perbaikan dalam gambar, maka

perlu datang untuk perbaikan ke mall pelayanan publik yang semua aplikasinya sudah disiapkan," jelas Amrin.

Amrin menjelaskan, awalnya pendirian MPP disiapkan untuk Pusat Jajanan Serba Ada (pujasera). Namun karena mendapat dukungan penuh dari Bupati dan DPRD, MPP dibangun guna memberikan semua pelayanan masyarakat.

"Kami selalu mendapat dukungan baik dari Bupati maupun DPRD, sehingga kami dapat bekerja dengan nyaman. Kami berjanji bahwa MPP ini akan memberikan pelayanan penuh untuk masyarakat," jelasnya.

Amrin menyebutkan, jumlah anggaran pembangunan MPP telah disiapkan sebesar Rp 10 Miliar. Meskipun pencairannya tidak langsung sekaligus, namun menurutnya, komitmen membangun Kabupaten Banyumas yang lebih baik ini dapat dijalankan secara bersama.

"MPP ini merupakan wajah pemerintah, baik Presiden, Gubernur dan Bupati. Karena pelayanan publik ada dari Polri, Kejaksaan, Kanwil Kemenkumham, HAKI, tanda merk, imigrasi untuk pengurusan Paspor TKI, Paspor Umum dan Paspor Haji," ujarnya.

Amrin mengakui MPP Kabupaten Banyumas seringkali menjadi tujuan studi banding. Apalagi, klaim dia, Kabupaten Banyumas telah menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) versi KPK. Sehingga popularitas dan frekuensi kunjungan dari daerah lain meningkat.

"Memang ribet karena banyak hal yang harus kami siapkan dan optimalkan serta selalu dimonitor KPK. Namun hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk mendukung visi misi Bupati sebagai barometer pelayanan publik di wilayah jawa," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Mustofa mengapresiasi langkah Kepala Dinas yang mampu menerapkan *political will* dan bersinergi antara Kepala Dinas, Bupati dan DPRD. Sehingga telah memiliki MPP dengan pengelolaan yang baik.

"Dinas PMPTSP adalah wajah Pemerintah Daerah sebagai pemangku jabatan yang memiliki integritas, serta tidak pernah terlibat kasus korupsi kasus perizinan. Karena apabila daerah menerapkan perizinan dengan benar, maka yang lainnya juga senantiasa baik," ungkapnya.

Mustofa juga mengapresiasi peran dr Budhi Setiawan. Ia menilai Budhi yang juga mantan Wakil Bupati Banyumas itu mampu mendukung pemda dalam melaksanakan program MPP. Selain itu, Budhi Setiawan juga dinilai tegas dalam mengawasi dan membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif.

•Muiz



Komisi III Dorong PUPR Normalisasi Sungai

Penyempitan alur sungai terjadi di Desa Sarabau dan Gamel. Hal itu pun menyebabkan banjir. Komisi III mendorong Dinas PUPR untuk normalisasi sungai secepatnya.



UMAMAS *top: 0101-0101

Untuk meninjau rencana perbaikan infrastruktur pasca banjir, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Desa Sarabau Kecamatan Plered. Dalam kunjungan itu, Komisi III menerima beberapa keluhan warga mengenai persoalan penyebab adanya genangan air.

Camat Plered Hardomo, menyampaikan terdapat dua desa di Kecamatan Plered yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Yaitu Desa Sarabau dan Gamel. Menurut pengamatannya, hal tersebut disebabkan aliran air yang tersumbat oleh

sampah. Juga karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah.

Hardomo juga mengatakan, sampah yang menutup aliran air itu kerap kali berasal dari wilayah lain, yang mengarah ke Desa Sarabau dan Gamel. Tumpukan sampah tersebut, lanjutnya, dihantarkan oleh air akibat tanggul sungai yang jebol.

Menurut pemaparannya, sebanyak lima tanggul sungai mengalami kerusakan dan jebol. Pemerintah Desa (Pemdes) sendiri sudah memperbaiki dua tanggul tersebut. Namun, kata Hardomo, permasalahan ini ti-

dak dapat lagi ditangani Pemdes, karena kiriman air dari hilir sudah tidak tertampung.

"Tahun 2021 ini normalisasi sungai kurang baik karena sedimentasi sungai dan air kiriman. Jadi ketika musim penghujan intensitas genangan semakin tinggi," ungkapnya.

Faktor lainnya, kata Hardomo, adalah berdirinya bangunan warga di sekitar bantaran sungai yang membuat alur sungai di hilir semakin kecil. Pun, di jalur double track kereta, membuat genangan air yang tinggi sampai ke Desa Gamel.

Kuwu Desa Gamel Junedi,



membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, penyempitan alur sungai menyebabkan mengalirnya air ke pemukiman desa. akibatnya, kiriman sampah pun menjadi permasalahan yang sering terjadi.

Junedi juga mengungkapkan, pada 2020 Pemdes Gamel telah melakukan pengangkutan sampah dengan menggunakan enam dumptruck. Namun, lanjut Junedi, tumpukan sampah selalu ada karena kiriman dari wilayah lain.

"Di Desa Gamel, masalah tumpukan sampah dapat diatasi, akan tetapi pada saat musim penghujan, muncul lagi sampah dari daerah lain yang bermuara

ke sini," ungkapnya.

Senada dengan Junedi, Kuwu Desa Sarabau Akmad Dandon, juga mengeluhkan penanganan permasalahan banjir. Menurutnya hingga sekarang belum ada program yang direalisasikan oleh dinas terkait. Untuk itu, ia berharap agar Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mendesak dinas untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol serta normalisasi sungai.

"Kami berharap ada normalisasi sungai untuk menangani permasalahan banjir. Karena berimbas pada rumah warga yang turut tergenang. Saya khawatir menimbulkan masalah keseha-

tan," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto, mengatakan penanganan normalisasi sungai bukanlah kewenangan dinas. Melainkan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWSC) Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Meskipun demikian, dalam meminimalisasi persoalan banjir yang kerap terjadi, kata Hermanto, Pemkab Cirebon akan menganggarkan beberapa program melalui Dinas Perumahan dan Pencanaan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon.

"Pemkab akan menyodet sungai yang mengalir daerah Desa Sarabau dan Gamel. Serta akan memperbaiki tanggul yang jebol," ungkapnya.

Sementara persoalan penyempitan aliran sungai karena bangunan warga di sekitar bantaran sungai, Hermanto meminta Pemdes dan kecamatan agar menginventarisasi surat tanah warga yang membangun tempat tinggal atau bangunan lainnya di area sungai.

Selain itu, dalam menangani permasalahan yang ada di *double track* kereta, Hermanto mengatakan Dinas PUPR akan mediasi dengan PT KAI Daop 3 maupun PT KAI Pusat.

Hermanto pun berharap, Dinas PUPR agar bisa bekerjasama dengan pihak yang berwenang dalam rangka menertibkan permasalahan sungai yang meluap. Serta mensosialisasikan kepada warga yang membangun rumah di sekitar bantaran sungai.

"Kami minta Dinas PUPR agar saling bekerjasama dalam upaya penanganan banjir yang berada di wilayah Desa Sarabau dan Gamel, serta wilayah lainnya di Kabupaten Cirebon," tandasnya. •Sar

Komisi IV Dukung RSUD Waled Jadi Rujukan Vaksinasi

Ratusan nakes RSUD Waled siap lakukan vaksinasi lagi. Selain itu, RSUD Waled pun bersedia dijadikan tempat vaksinasi bagi masyarakat umum. Komisi IV pun mendukung penuh kesiapannya.



foto-foto : dok. setiawan

Keseriusan upaya pencegahan dan penanganan covid 19 tampaknya terus dilakukan oleh RSUD Waled. Hal ini dibuktikan dengan rencana vaksinasi kembali bagi para tenaga medis atau tenaga kesehatan (nakes). Sebelumnya, sebagian nakes RSUD Waled pun, telah menerima vaksin pada tahap pertama.

"Ada 679 nakes RSUD Waled yang akan menerima vaksin. 20 di antaranya sudah divaksin pada tahap pertama. Kemudian akan dilanjut tahap kedua da-

lam jangka waktu 14 hari pasca penyuntikan pertama," ungkap Direktur RSUD Waled, dr H Budi Setiawan Soenjaya MM.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina, mengingatkan baik nakes dan masyarakat agar tidak perlu ragu dengan adanya vaksinasi covid 19. Siska meyakinkan, vaksin yang disuntikkan telah aman dan berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari virus.

Apalagi, menurut Siska, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun te-

lah mengeluarkan edaran kalau vaksin ini aman dan halal.

"Insya Allah kalau sudah divaksin badan kita akan semakin sehat," terangnya.

Selain mensukseskan program vaksinasi nasional, Budi juga menyampaikan, RSUD Waled telah siap apabila dijadikan tempat vaksinasi covid 19 bagi masyarakat umum. Meskipun hingga sekarang belum ada info terkait tempat vaksinasi.

"Kami siap kalau ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan untuk menjadi tempat vaksi-



nasi bagi masyarakat luas," paparnya.

Menanggapi hal itu, Siska mengapresiasi dan mendukung penuh langkah kesiapan RSUD Waled dalam mensukseskan program vaksinasi nasional. Namun, Siska tetap menyarankan baik nakes maupun masyarakat untuk senantiasa menerapkan pro-

tolok kesehatan meskipun telah divaksinasi.

"Tetap patuhi 5 M. Karena vaksin hanya membantu kita terhindar dari covid sekitar 65 persen," jelasnya.

Sejauh ini, RSUD Waled setidaknya telah menerima pasien covid 19 sebanyak 789 orang. Dari data tersebut, merupakan total gabungan antara pasien terkonfirmasi dan pasien yang terduga. Yakni, 446 orang positif dan 343 orang *suspect*.

Sementara, jumlah korban meninggal akibat virus covid 19 sebanyak 113 pasien. 3 pasien *probable*, 64 orang positif dan 46 orang *suspect*.

Dengan semakin bertambahnya jumlah korban covid 19, RSUD Waled pun terus menggalakkan peraturan penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk keselamatan bersama.

"Pengaturan jadwal kunjungan kita batasi, kewajiban jaga jarak serta penerapan prioritas keselamatan bagi nakes yang berhubungan langsung dengan pasien covid 19," jelas Budi.

Selain itu, RSUD Waled juga telah melakukan pemisahan fasilitas umum demi mencegah penyebaran virus covid 19. Fasilitas rumah sakit dibagi menjadi dua yang diperuntukkan khusus pasien terpapar covid dan pasien *non covid*. Hal itu dilakukan agar mampu meminimalisasi penyebaran virus melalui benda mati maupun fasilitas lainnya.

"Pemisahan tersebut mungkin sulit dilakukan apalagi untuk rumah sakit rujukan yang harus dapat menangani semua keluhan masyarakat. Terlebih, masih belum banyaknya fasilitas rumah sakit di daerah," katanya.

Budi juga berpendapat, rumah sakit yang khusus melayani pasien covid 19 haruslah dibuat eksklusif. Agar tidak menambah kasus positif, Budi mengatakan, orang yang merasa tidak sehat diharapkan cukup beristirahat saja di rumah, serta meminum obat bila diperlukan. Terlebih, jika suhu badan mencapai 38 derajat celsius disertai batuk pilek.

"Jika keluhan berlanjut hingga kesulitan bernafas, maka segera berobat ke dokter atau rumah sakit. Tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan. Upayakan juga tidak menggunakan angkutan umum," katanya.

Namun, kata Budi, salah satu cara yang paling ampuh untuk memperlambat penyebaran virus covid 19 adalah dengan menerapkan *social distancing*. Namun, menurutnya, saat ini tidak semua orang bisa menahan diri untuk tetap di rumah, apalagi jika hal tersebut berkaitan pekerjaan.

Menanggapi itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mengajak seluruh masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan dan ajakan menerima vaksinasi.

"Mari sukseskan program vaksinasi ini, agar bisa terhindar dari covid 19 karena imun tubuh kita kuat," tandas Siska. •Sar



Junaedi : Tekad Keras Berbuah Manis

Tekad kerasnya mengembangkan partai berbuah manis. Junaedi terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKS sejak 2004 hingga sekarang. Bagaimana perjalanan karir politiknya?

Cuaca Cirebon cerah. Matahari memantulkan cahaya begitu indah. Tampak dari luar, gedung berwarna kuning-putih menyala terang, sosok pria bertubuh semampai memakai batik serta kacamata menggantung datang menyambut. Sikap hangat, tutur santun dan terbuka mampu menyihir setiap orang di dekatnya menjadi nyaman. Ia adalah Junaedi, pria kelahiran Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.

Sosok satu ini jika dibicara-

kan tak ada habisnya. Dari setiap peristiwa yang menyimpannya, tak pernah menjadi hambatan dalam membangun kehidupan. Langkah demi langkah, ia jalani dengan penuh optimis.

“Saya berpegang teguh pada hadis Nabi ‘Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain’. Karena kebaikan secara privasi itu kurang bermakna, kalau tidak dirasakan manfaatnya untuk orang lain,” jelasnya.

Semasa kecil, Junaedi sangat menyukai sepakbola. Pe-

rawakannya kurus namun lincah, membuat sebagian orang terpana saat ia menggiring bola dan lari saat mengikuti pertandingan.

Tapi hobi itu tak bertahan lama. Setelah masuk SMA, dan aktif sebagai rohis, perlahan mulai ada perubahan dalam dirinya. Momentum ini mengubah perspektif hidupnya. Ia mempunyai kewajiban dan aktivitas lain yakni, menghidupi mushola.

“Banyak hal yang mengubah perspektif saya saat aktif di rohis. Yang dulu suka sepakbola, mulai ditinggalkan, sehingga hobi baru

yang dilakukan waktu itu hanya membaca,” terangnya.

Sejak itu lah, Junaedi pun rutin menyisihkan uangnya untuk membeli buku, bahkan hingga sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Genrenya pun bermacam-macam, dari tema lingkungan, keislaman hingga politik. Pernah suatu ketika, tepatnya 2008, rumah yang ia tempati hangus tak bersisa dilahap api. Sebagai bibliofili, Junaedi lebih mengutamakan ilmu pengetahuan yang ia selamatkan terlebih dahulu.

“Saya tidak memikirkan perabot rumah waktu kebakaran itu, yang saya pikirkan itu buku saya habis,” tutur Junaedi.

Junaedi tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tak mengenal istilah merantau. Masa remajanya dari sekolah dasar hingga lulus SMA, ia habiskan di Cirebon. Barulah setelah SMA ia tinggal di Bandung untuk kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Selama kuliah, Junaedi terlibat dalam gerakan aktivis kampus. Tepatnya 1998-1999 saat ekonomi Indonesia mengalami surut, ia bersama teman aktivis lainnya turut serta berdemonstrasi dalam menumbangkan Orde Baru (Orba).

Keaktifannya dalam gerakan aktivis kampus ternyata membawa jejaring bagi Junaedi pada ruang politik. Puncaknya, Junaedi pun terlibat dalam pendirian Partai Keadilan sebelum akhirnya menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karirnya pun dimulai dengan menjadi pengurus tingkat kecamatan DPC PKS di Bandung.

Setelah tugas di Bandung selesai, tahun 2000 ia pun kembali ke Cirebon. Tak menunggu waktu lama, Junaedi langsung diberi kepercayaan untuk mengajar



Junaedi, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PKS

di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) yang saat itu baru berdiri. Selain itu, ia juga didorong oleh teman-temannya agar masuk pengurus partai di tingkat kabupaten.

“Saat itu, padahal yang terbayang hanya kerja menjadi konsultan. Tapi banyak masukan dari teman-teman agar tidak masuk ke wilayah konsultan atau pemborong. Karena banyak zona abu-abu disitu. Dan akhirnya saya pun melanjutkan untuk aktif di partai sambil menjadi dosen,” jelasnya.

Segudang pengalaman yang diperolehnya di Bandung tak membuatnya congkak. Ia memberi pelajaran bahwa pesona hidup paling hebat di dunia adalah kerendahan hati. Meski sudah masuk partai, tapi ia belum punya ketertarikan diranah politik praktis secara serius. Junaedi masih menikmati dunia akademis.

“Kultur di PKS itu susah me-

rencanakan karir, karena menjadi caleg PKS sifatnya *given*. Dari semua caleg di kabupaten yang menilai pengurus DPW, dan dipilih siapa yang memenuhi kriteria paling ideal,” ungkapnya.

Namun sebagai anggota PKS, ia ditugaskan mengembangkan kader. Khususnya wilayah timur yang masih minim. Itu menjadi pemicu awal ia semangat berkontribusi di partai. Hidup *nomaden* tak membuatnya surut bersitungkin.

Barulah tahun 2004, Junaedi mencalonkan diri sebagai wakil dari PKS dalam pemilihan legislatif. Ia pun terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon sampai sekarang. Sebuah kerja keras yang berbuah manis membuat Junaedi dipercaya sebagai wakil rakyat hingga 4 periode.

“Ketika sudah terjun dan terlibat di DPRD, saya selalu menekadkan diri agar menjadi anggota dewan yang profesional dan aspiratif,” katanya. •**Ian**



foto: foto: qusny/dk

Sofatillah : Jalani Sesuatu Berangkat Dari Kesenangan

Hobinya mempercantik wajah dengan berbagai jenis kosmetik, hingga akhirnya berjualan. Siapa sangka, ia menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon selama 2 periode. Bagaimana kisahnya?

Perempuan akan selalu di bawah laki-laki, kalau yang diurusi hanya baju dan kecantikan. Agaknya keliru, jika kalimat di atas menggeneralisasi semua perempuan. Palsunya, sosok perempuan satu ini mempunyai cara lain dalam menjalani hidup.

Perempuan itu bernama Sofatillah, lahir di Desa Beberan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Sebagai seorang perempuan, ia mesti dijadikan panutan. Mengingat pemahaman yang masih mengakar di masyarakat, bahwa perempuan hanya boleh bekerja di 3 hal: dapur, sumur, kasur. Tapi itu tak berlaku baginya.

“Perempuan harus memosisikan diri setara

dengan laki-laki. Karena perempuan bukan makhluk nomor dua, ia juga bisa berekspresi sesuai yang diinginkan,” tegasnya.

Setamat SMA, Sofa sapaan akrabnya, mempunyai keinginan kuliah di luar Cirebon. Namun orang tua tak memberinya ijin. Akhirnya, ia memutuskan untuk merantau bersama saudara bekerja di Jakarta. Menjadi seorang perantau ia banyak mendapat pelajaran, terutama dalam memperjuangkan hidup.

Selain itu, Sofa juga mempunyai hobi mempercantik wajah. Hobi itu kemudian ia tuangkan dalam bentuk usaha. Sepulangnya dari Jakarta, tepatnya 2004. Ia diberikan ruko oleh orang tuanya untuk membangun bisnis kecil-kecilan. Dari situ ia menco-

ba membuka salon dan menjual ragam kosmetik di Pasar Minggu.

“Dulu, saat usia masih 25 an, saya mempunyai semangat untuk memulai usaha. Apalagi sekarang akses media sudah banyak, bisnis online pun jadi lebih mudah. Makanya kalau sekarang, anak muda masih diam dan bermain itu akan ketinggalan,” ungkapnya.

Berawal dari usaha itu, ia bertekad mengembangkan potensi berbisnisnya. Banyak lika-liku permasalahan yang datang silih berganti, namun tak membuat semangatnya merosot. Ia justru menjadi bekerja sekeras mungkin, agar setiap jengkal prosesnya membuahkan hasil meski keringat mengalir deras dua kali lipat.

“Memulai usaha itu yang penting mempunyai keinginan kuat dan fokus menjalaninya. Alhamdulillah sekarang saya punya 2 toko dengan 7 karyawan,” katanya.

Tahun 2008, ia mencoba menggapai kembali impian yang hampir sirna, melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ia pun berkuliah di Universitas Swadaya Gunung Jati, yang sekarang menjadi Universitas Gunung Jati (UGJ) mengambil prodi hukum. Tak tanggung-tanggung, setelah menamatkan kuliah S1, tahun 2012 ia langsung mengambil program magister, di kampus yang sama.

Tak berhenti di situ, berangkat dari ketekunan dan keuletan dalam mengerjakan sesuatu. Membuatnya semakin terpacu untuk melihat dunia dalam sudut pandang berbeda. Ia terjun dalam organisasi, selain menambah pengalaman ia juga ingin mengenal orang lain lebih banyak.

“Saya pengen punya temen di luar usaha. Kemudian waktu itu saya diajak teman untuk gabung di sayap Partai Gerindra. Saya pun bergabung dengan Perempuan Indonesia Raya (PIRA). Yang bergerak di bidang sosial,” tuturnya.

Tentu ini merupakan pintu awal masuk karirnya di politik. Perlahan Sofa mulai sedikit ada ketertarikan untuk terjun lebih dalam. Dengan banyaknya dukungan dari teman atau internal partai. Ia pun berkeinginan untuk maju di ranah legislatif. Meski seorang perempuan, ia tak gentar dalam memli jalan di jalur politik praktis.

“Waktu itu jamannya kampanye Gubernur, tapi kemudian saya tertarik. Tak lama saya diajak teman untuk daftar menjadi caleg. Karena saat itu suara pemenuhan perempuan harus mencapai 30 persen,” katanya.

Meniti karir sebagai anggota partai, membuatnya semakin optimis dalam melangkah. Tentu semua tidak berjalan mulus, ada banyak ragam persoalan



dan tantangan yang ia temui. Tapi ia hadapi dengan penuh kesabaran.

Tahun 2014 akhirnya Sofa beranikan diri untuk maju dalam kontestasi politik, sebagai calon legislatif dari Fraksi Gerindra. Ia pun terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2014-2019. Kemudian terpilih kembali pada periode 2019-2024.

“Waktu itu saya belum siap. Tapi karena saat itu kadung masuk di organisasi, mau tidak mau saya harus siap. Awalnya mungkin hanya keisengan, tapi kok dalam hati selalu dituntut bekerja secara serius. Jadi saya bismillah saja,” ungkapnya.

Berangkat dari kepala kosong, Sofa mulai banyak belajar dinamika politik. Terjun di situ semacam anomali bagi hidupnya, ia kerap kali menganggap bahwa proses yang dijalani adalah sesuatu yang baru. Ia ingin lebih memahami lebih jauh, terutama mengenai peta politik. Dan itu menjadi pemicu untuk terus belajar.

“Saya sangat bersyukur akhirnya diberi kepercayaan untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Saya akan melakukan sebagaimana prinsip hidup saya sendiri, menjalani sesuatu harus berangkat dari kesenangan,” tandasnya. •Ian

Kreasi Alumunium Bekas Jadi Lukisan 3 Dimensi

Berbekal hobi berkreasi, Emik menyulap limbah alumunium menjadi lukisan 3D. Baginya kreativitas adalah kemewahan terakhir manusia.



Barang bekas biasanya dibuang begitu saja. Namun itu tidak berlaku bagi Emik, seorang pemuda Desa Tegalgubug Lor, Kecamatan Arjawinangun. Emik melihat barang bekas dengan cara pandang yang berbeda. Ia pun mengolahnya menjadi karya yang bernilai.

Di ruang tamu rumah Emik, terpampang banyak lukisan relief alumunium yang indah berbentuk wajah manusia. Lukis-

an-lukisan itu, mulanya adalah limbah alumunium yang bagi kebanyakan orang dianggap sampah. Dengan bakat seninya, Emik pun menyulapnya hingga menjadi lukisan.

Kemampuan seni berkarya yang dimiliki Emik, rupanya telah muncul sejak masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Di usianya yang masih anak-anak itu, Emik memiliki hobi berkreasi mulai dari menggambar, me-

warnai hingga menganyam.

“Saya pun mengasah terus kreativitas itu, supaya lebih berkembang,” ujarnya.

Usai lulus SD, Emik pun melanjutkan belajar di Pondok Pesantren (Ponpes) Babakan Ciwaringin, Ponpes Tegalgubug, hingga Ponpes Lirboyo Kediri. Dari situ, ia pun memiliki *skill* baru, yakni membuat lukisan relief dari bahan alumunium.

Kemampuannya itu ia dapat-

kan semasa masih menjadi santri di Pesantren Lirboyo. Emik memiliki hobi berkelana dan berkeliling pulau Jawa hingga Madura. Apa yang dilakukannya itu bukanlah tanpa sebab. Ia memiliki prinsip, bagaimana setelah pulang dari ponpes bisa membuat karya baru.

Hingga pada tahun 2011, Emik bersinggah di Kota Demak. Tepatnya di sebuah toko produksi lukisan relief berbentuk tulisan kaligrafi dari bahan alumunium. Di tempat tersebut, Emik merasa panasaran. Ia pun kemudian mendekat dan bertanya kepada pengrajin setempat tentang cara memproduksinya. Hingga suatu hari, ia pun mendapat kesempatan untuk belajar praktik memproduksi sendiri.

“Saya mulai belajar cara memproduksinya. Alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai bisa. Walaupun tidak mudah belajarnya,” ungkapnya.

Namun sepulang dari pondok, ia lama tidak menekuninya. Ide kreativitas yang dimilikinya muncul kembali dari kepekaannya terhadap lingkungan sekitar. Kala itu, Emik resah melihat sampah berserakan di pasar Tegalgubug. Lalu Emik memilah dan membawanya ke rumah, agar sampah tersebut bisa bermanfaat.

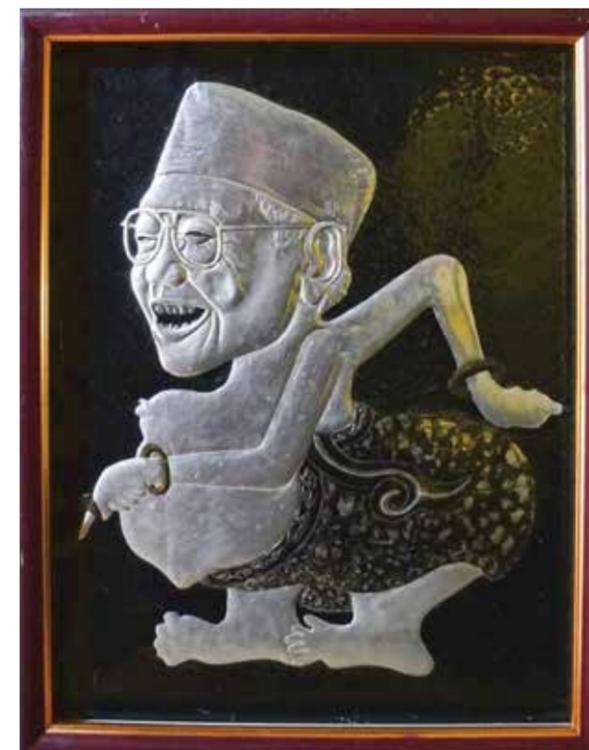
“Saya terpikir lagi untuk menekuni belajar membuat lukisan 3D dari bahan alumunium, kemudian di jual. Kalau kata seorang musisi Iwan fals, bagaimana caranya agar sampah ini bisa jadi uang,” kata Emik.

Lukisan tersebut dijual bagi siapapun yang berminat. Bahkan, pelanggan bisa memesan sesuai bentuk yang diinginkan. Emik adalah satu dari sedikit pengrajin relief alumunium di Kabupaten Cirebon. Produk kerajinannya pun mampu bersaing dengan produk lainnya.

“Ngukir Lukisan 3D model kaligrafi itu mudah, satu hari saja bisa jadi. Yang susah model wajah orang, membutuhkan waktu 3 hari,” katanya.

Sedangkan untuk cara produksinya, Emik membutuhkan bahan alumunium berukuran sesuai dengan keinginan pembeli. Mulai dari A4 hingga A3. Lalu Emik pun membuat sketsa gambar sesuai keinginan pembeli untuk ditempelkan ke alumunium tersebut. Terakhir, ia membuat ukiran tiga dimensi menggunakan alat sederhana berupa pensil dan paku.

Hingga sekarang, Usaha kerajinan relief alumunium milik Emik, telah berjalan meskipun dengan modal yang terbatas. Ia menjalaninya sebagai hobi yang dikomersilkan. Untuk modal satu lukisan berukuran A3, Emik harus merogoh kocek sekitar Rp



300 ribu. Kemudian ia pun menjualnya kisaran Rp 1 juta.

“Modal paling besar adalah *skill*. Sebab tidak banyak orang yang bisa membuatnya karena harus dibarengi dengan jiwa seni yang tinggi. Jadi, yang susah itu prosesnya,” ungkapnya.

Untuk pemasaran lukisan, Emik menggunakan akun media sosial pribadi mulai dari Facebook, Instagram hingga WhatsApp. Selain itu, ia pun mengajak teman-temannya untuk turut serta memasarkannya.

“Kalau ada pesanan saya langsung garap. kalau tidak ada, saya bekerja serabutan, kadang jualan dagangan orang,” jelas Emik.

Hingga sekarang, hasil penjualan lukisan Emik, telah laku ke beberapa wilayah 3 Cirebon. Bahkan ia pun pernah mengirim lukisannya hingga ke Negara China. Selain itu, sejumlah pejabat pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah desa (Pemdes) pun banyak yang berminat. Termasuk Bupati Cirebon Imron Rosyadi dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi.

“Bisa coba lihat di ruangan bupati. Kemarin-kemarin sih masih terpampang Lukisan 3D dengan model wajah beliau, karya saya sendiri,” pungkasnya. •Muiz

Bukit Bambu

Suguhan Ketenangan Hingga Belajar Berkebun

Apa jadinya jika tanah longsor dijadikan tempat wisata? Apalagi wisata yang mengedukasi. Para pengunjung pun bisa bermain sambil berkreasi.



foto: foto: Quasy/Da

Langung hingga bersih, tak lepas dari balutan skema wisata ini. Tak ayal, para pengunjung rela berlama-lama hanya sekedar untuk duduk bersantai.

Hamparan rumput hijau di atas lahan berjenjang disertai deretan pohon bambu, itulah yang disuguhkan di sini. Ditambah dengan *view* Gunung Ciremai memberikan nuansa panorama alam yang natural. Menyegarkan sejauh mata memandang.

Wisata itu bernama Bukit Bambu, selain menampilkan pemandangan, Bukit Bambu juga merupakan objek wisata yang

memiliki konsep edukasi dan ramah lingkungan.

“Kita kemas sebagai tempat wisata, namun dengan nuansa yang berbeda. Biasanya wisatawan suka tempat yang *abring-abrangan*, kalau di sini enggak. Kita juga meminimalisasi sampah dan penggunaan plastik,” ungkap Jauharul Fuad, pengelola Taman Edukasi Bukit Bambu.

Wisata ini berprinsip mengurangi penggunaan material-material industri. Bisa terlihat, sekitar 80 persen fasilitas umum pengunjung terbuat dari bahan dasar bambu. Seperti bangunan aula, *caffe*, *mushola*, toilet, dan sebagainya.

Bangunan-bangunan yang telah berdiri tersebut, dibuat dari bambu yang telah diawetkan menggunakan larutan tertentu. Kemudian divernis supaya warna dan bangunannya bisa bertahan lama. Di sini, pengunjung juga dapat melihat proses atau instalasi pengawetan bambu serta mengenali jenis-jenisnya.

Meskipun bernama Bukit Bambu, wisata ini tidak melulu semuanya tentang bambu. Karena konsepnya edukasi, Bukit Bambu juga memfasilitasi pengunjung dengan lahan khusus untuk berkebun. Pengunjung bisa belajar menanam tumbuhan di lahan tersebut, terutama jika



mereka merasa bosan. Sekitar 30 jenis bibit telah ditanam seperti cabai, tomat dan lain sebagainya.

“Bukan hanya bambu dan tanaman, di sini juga ada beberapa hewan ternak seperti kelinci, soang, kambing dan kuda. Pengunjung bisa sekedar berinteraksi dengan hewan,” kata Fuad.

Bahkan, di area bawah perbukitan juga terdapat lapangan khusus untuk pengunjung belajar menunggang kuda. Ada tiga ekor kuda di Bukit Bambu, salah satunya kuda putih yang biasa berada di depan gerbang, sebagai penarik sekaligus tanda bahwa Taman Edukasi Bukit Bambu telah dibuka.

Untuk bisa masuk ke wisata ini, pengunjung hanya perlu merogoh kantong sebesar Rp 15 ribu untuk mendapatkan tiket. Adapun tiket masuk tersebut nantinya bisa

ditukar untuk memperoleh air mineral. Dan botol bekasnya bisa ditukarkan dengan *souvenir* yang terbuat dari bambu.

Lokasi Bukit Bambu menyatu dengan perumahan Graha Darussalam Desa Patapa, Kecamatan Beber. Di mana, awalnya adalah bagian dari tanah perumahan tersebut. Namun karena struktur tanah yang licin seperti lempung, akhirnya menyebabkan longsor. Barulah kemudian digarap menjadi taman bambu.

“Tadinya ini lahan perumahan yang longsor, beberapa kali dibenahi tetap gerak tanahnya, ya sudah saya tanami pohon bambu saja. Setelah saya cari tahu, ternyata pohon bambu banyak fungsinya, termasuk konservasi, dimana cocok untuk lahan yang kritis,” jelas Fuad.

Pohon bambu memiliki po-

tensi besar untuk dikembangkan menjadi hal yang bermanfaat. Hanya saja, menurut Fuad, tidak banyak masyarakat yang tertarik untuk menanam bambu. Padahal, jika ditelusuri secara mendalam, bambu mempunyai berbagai manfaat dan kegunaan. Seperti halnya mencegah banjir dan longsor, karena bisa menyerap banyak air.

“Pemerintah pernah membuat program setiap desa harus menanam bambu, tapi masyarakat tidak ada yang mau, lalu dilimpahkan ke sini,” kata Fuad.

Hadirnya wisata edukasi Bukit Bambu di Kecamatan Beber ini, bertujuan memperkenalkan bambu secara lebih luas, terutama dalam pelestariannya. Karena itulah, wisata ini mencoba mengedukasi para pengunjung yang datang tentang pohon bambu. Baik dari cara mengawetkannya, serta produk apa saja yang bisa dihasilkan dari bambu. Namun, karena beberapa hal, rencana tersebut belum bisa dilakukan secara luas.

“Bukit Bambu ini belum kita garap secara optimal. Pengennya kita mengedukasi tentang manfaat bambu dan apa saja yang bisa dihasilkan dari bambu. Namun fasilitasnya masih minim, pengrajin dan *expert* belum ada,” jelas Fuad.

Meskipun demikian, Fuad berharap potensi bambu yang ada di Kecamatan Beber bisa lebih digalakkan. Ia juga berharap adanya Bukit Bambu bisa menjadi *learning centre* bagi masyarakat sekitar dan komunitas bambu untuk bertukar pikiran.

“Saya harap masyarakat bisa diajak menanam pohon bambu terutama di lahan-lahan kritis yang tidak terpakai. Karena bagus untuk menahan erosi,” tandasnya. •Sar

Mohamad Luthfi



Sedang-sedang Saja

Sore itu di sebuah kedai makan. Kami memilih meja di ujung ruangan. Suasana tidak begitu ramai. Perbincangan di meja sebelah pun cukup jelas terdengar.

"Kapan ya corona mari (berhenti)?" ujar sosok pria berperawakan kurus. "Marie ya lamon sira ora mikiri (berhentinya kalau kamu gak memikirkannya)," jawab pria berkumis di hadapannya singkat, disusul suara kerupuk yang ia kunyah.

"Yee pribe beli mikiri wong ana jeh (gimana tidak memikirkan, orang nyatanya ada)," ujar si Kurus. "Biasa aja kali, anggep bae kaya virus sejene. Apamaning akeh virus sejene sing luhih ganas (anggap saja seperti virus lainnya. Apalagi banyak virus lainnya yang lebih mematikan)," timpal si Kumis.

Begitulah obrolan kedai makan. Dialog serupa, saya yakin, juga terjadi di tempat lain, di kedai-kedai kopi, warung sayur, pasar, sawah, kantor, hingga di ruang-ruang keluarga, bahkan mungkin di kamar pengantin.

Apa yang dikatakan si Kumis sekilas tampak sepele, namun cukup menarik. Perang sesungguhnya terhadap covid-19 kini sudah menjadi perang pikiran. Karena sejatinya perang terhadap virus, sebagaimana virus dan penyakit lainnya, tidak ada istilah menang atau kalah. Tapi soal bisa sembuh atau tidak.

Bahkan, jika standarnya atau ujungnya adalah kematian, maka yang ada hanyalah sementara sembuh atau sementara sehat. Tidak ada kemenangan abadi dalam menghadapi masalah fisik. Kematian pasti akan menjelang.

Untuk itulah, kata si Kumis, ini soal pikiran. Tidak perlu menyepelkan, juga tidak boleh berlebihan. Biasa-biasa saja. Hadapilah covid-9 sebagaimana menghadapi virus lain, seperti influenza, batuk, pilek, polio, gondongan, campak, herpes, ebola, aids, hepatitis, hingga flu burung.

Sekali lagi, ini soal bagaimana pikiran kita menghadapinya. Hadapilah covid-19 ini dengan ringan saja. Jalankan protokol kesehatan. Berikutnya jalankan protokol keagamaan: berdoa dan tawakal. Selanjutnya beraktivitaslah seperti biasa.

Jika saatnya vaksinasi, ya ikuti saja jika memang Anda yakin. Jika tidak, ya itu hak Anda. Anggap saja seperti vaksinasi untuk virus lainnya, sebut saja vaksinasi polio atau campak. Ada yang bersedia, ada yang tidak kan? Jadi, biasa saja gak perlu debat, apalagi berantem sesama teman. Meski demikian, ada baiknya ikuti anjuran pemerintah.

Jadi, kalau ada yang bertanya kapan covid-19 berhenti? Ada baiknya mengikuti tips si Kumis: berhentilah berpikir berlebihan, berhenti bertanya. Pada saat Anda menyikapi sesuai porsinya, maka di saat itulah corona berhenti menghantui Anda.

Namun, jangan meremehkan, takabur, dan sombong. Jalani saja protokol kehidupan yang terbaik. Toh, protokol kesehatan dan ketawakalan melahirkan badan dan jiwa yang sehat, bukan? Jadi jalankanlah dengan senang hati, karena gaya hidup sehat bukan hanya menangkal covid-19, tapi juga virus lainnya.

Jika dipikirkan berlebihan, hingga menghantui diri, justru dapat berdampak sebaliknya, bisa sakit secara fisik dan kejiwaan. Pikiran yang tertekan atau stres mengakibatkan asam lambung naik, dan akan mengganggu pencernaan dan kesehatan Anda.

Apapun virus atau penyakitnya, tidak hanya covid-19, bisa berdampak buruk dan menyebabkan kematian. Sedangkan kematian adalah hal yang harus kita siapkan, bukan ditakuti. Nah, masalahnya justru ada di pikiran kita. Sejauh mana kita dapat menata pikiran dalam menyikapi itu semua.

Sekali lagi, bersikaplah tidak berlebihan, juga tidak meremehkan. Sedang-sedang saja. Beraktivitaslah seperti biasa. Jalani saja protokol yang ada. Semuanya akan ringan dan riang.



SEKRETARIS DPRD DAN SELURUH PEGAWAI



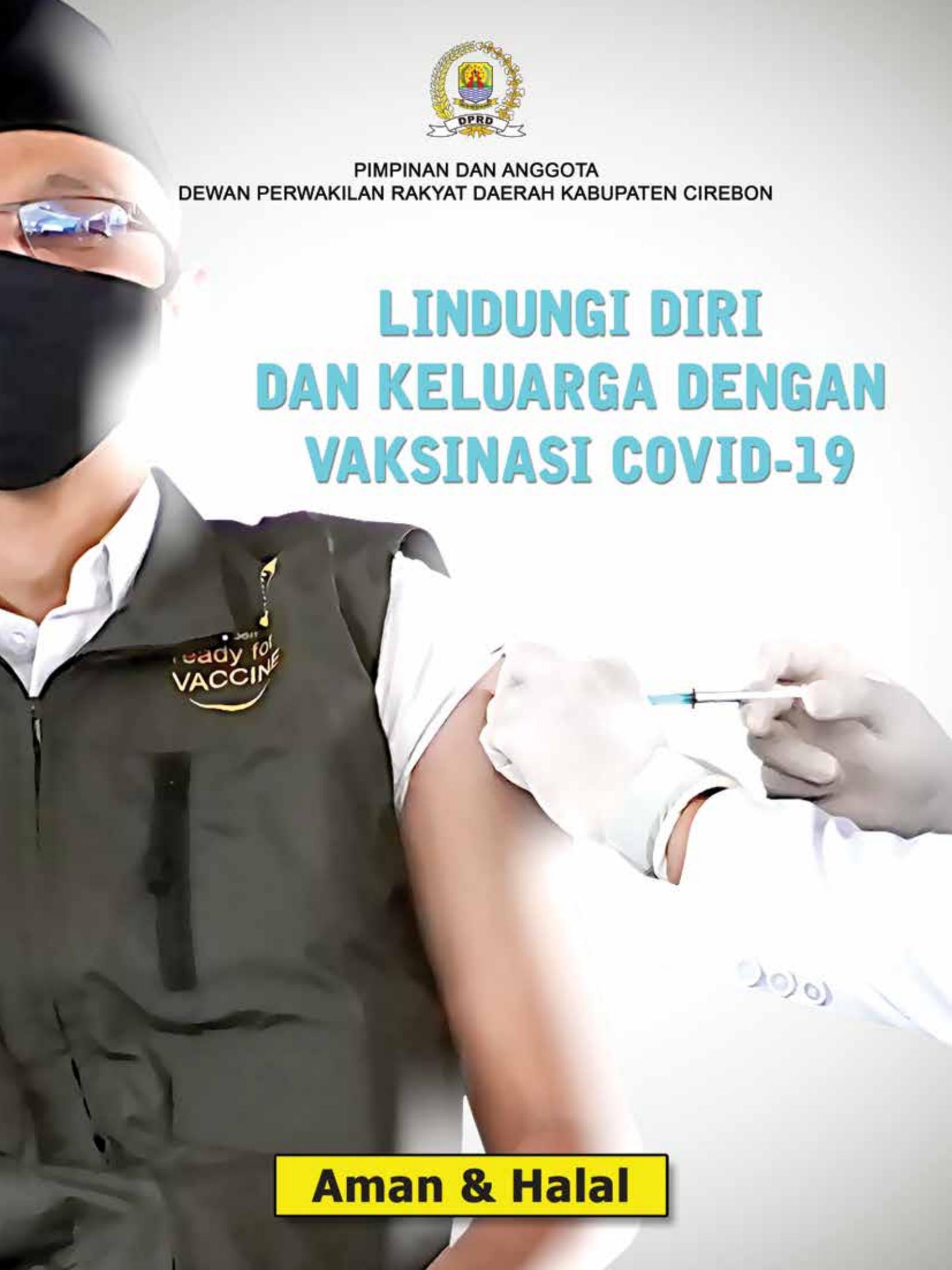
CIREBON PASTIKAN VAKSIN COVID-19

Aman & Halal



PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

LINDUNGI DIRI DAN KELUARGA DENGAN VAKSINASI COVID-19



Aman & Halal